

## **ANALISIS STAKEHOLDERS PADA DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DI PULAU PADANG (Stakeholders Analysis Of Social Conflict Dynamics in Padang Island)**

**Adi Firmansyah**

Program Magister Pengembangan Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana IPB, Jl. Raya Darmaga,  
Gedung Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680  
Penulis Korespondensi : [adifirman@apps.ipb.ac.id](mailto:adifirman@apps.ipb.ac.id)

### **ABSTRAK**

Dinamika hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat di beberapa tempat pada saat ini semakin kompleks yang dapat berujung pada konflik. Salah satu konflik sosial yang cukup menyedot perhatian publik adalah konflik sosial di Pulau Padang, Kabupaten Meranti. Terkait konflik tersebut, maka penting untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi. Salah satu tahapan untuk menuju kesana adalah dengan melakukan analisis stakeholders pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di atas. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis stakeholders yang terlibat dalam konflik di Pulau Padang. Lokasi kegiatan penelitian adalah di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti yang notabene merupakan desa sekitar hutan konsesi PT. RAPP. Data yang digunakan dalam makalah ini merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel internet dan hasil penelitian terkait. Konflik di Pulau Padang melibatkan unsur-unsur perusahaan (RAPP), LSM, seperti STR dan Pemerintah, baik pemerintah lokal hingga nasional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada 47 tokoh yang cukup intens menaruh perhatian atau terkait dalam peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dinamika kasus Pulau Padang. Selanjutnya ke-47 tokoh tersebut dianalisis dengan menggunakan Metode Power-Interest Grid (IFC, 2007). Diantara 47 stakeholder yang teridentifikasi, terdapat 36,17 persen termasuk kategori *manage closely* (MC), 8,51 persen termasuk kategori *keep satisfied* (KS), 21,28 persen termasuk kategori *keep informed* (KI) dan 34,04 persen kategori *monitor* (M). Diantara 47 stakeholder terdapat 8,51 persen (golongan KS) yang secara murni dapat digunakan pengaruhnya untuk membantu menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan pribadinya rendah. Golongan ini diharapkan dapat menetralkan pertarungan kekuasaan dan kepentingan golongan MC.

**Kata kunci:** analisis stakeholders, konflik sosial, penyelesaian konflik, Pulau Padang

### **ABSTRACT**

The dynamics of social relations between companies and communities in some places are increasingly complex that lead to conflict. One social conflict that is enough to attract public attention is social conflict on the island of Padang, Meranti Regency. Related to the conflict, it is important to find a solution to the conflict. One of the steps to get there is to do stakeholder analysis of the parties involved in the conflict above. The purpose of this paper is to analyze the stakeholders involved in the conflict on the island of Padang. The location of the research activity is in Padang Island, Merbau District, Meranti Regency which incidentally is a village around PT. RAPP. The data used in this paper is secondary data sourced from internet articles and related research results. The conflict in Padang Island involved elements of the company (RAPP), NGOs, such as STR and the Government, both local and national governments. Based on the results of the study, it is known that there are 47 figures who are quite intending to pay attention or are involved in events related to the dynamics of the Padang Island case. Next to the 47 figures were analyzed using the Power-Interest Grid Method (IFC, 2007). Among the 47 stakeholders identified, there were 36.17 percent including the manage closely (MC) category, 8.51 percent included the keep satisfied (KS) category, 21.28 percent included the keep informed (KI) category and 34.04 percent of the monitor category (M). There are 47 stakeholders 8.51 percent (KS group) whose influence can be purely used to help resolve conflicts, because they have a large influence but their personal interests are low. This group is expected to neutralize the power struggle and the interests of the MC group.

**Keywords:** stakeholder analysis, social conflict, conflict resolution, Padang Island

## PENDAHULUAN

Dinamika hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar di beberapa tempat pada saat ini semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan ditunjukkan dengan semakin intensnya konflik yang terjadi yang pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian berbagai pihak yang terlibat konflik. Konflik yang terjadi di masyarakat tidak dapat dihindarkan karena interaksi antara komponen masyarakat bisa berdampak sosial apa saja. Ketika konflik sudah terjadi, maka yang penting untuk dilakukan adalah mengelola agar jangan sampai konflik menjurus kepada konflik destruktif. Salah satu konflik sosial yang cukup menyedot perhatian publik adalah konflik sosial di Pulau Padang, Kabupaten Meranti.

Mencuatnya konflik di Pulau Padang terjadi mulai tahun 2009, yang dipicu oleh terbitnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tanaman industri di Kepulauan Meranti berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 327 Tahun 2009 untuk RAPP. Wilayah kegiatan RAPP di Pulau Padang tersebar cukup luas yang mencakup lebih dari 33.000 ha dan bersentuhan dengan 14 desa di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti- Provinsi Riau. Konflik di Pulau Padang melibatkan unsur-unsur perusahaan (RAPP), LSM (STR) dan Pemerintah. Gejala konflik muncul ke permukaan dalam beragam bentuk, seperti: (1) Demonstrasi di wilayah Pulau Padang, khususnya di lima desa, yakni Desa Tanjung Padang, Desa Lukit, Desa Teluk Belitung, Desa Mengkirau, Desa Melibur; Mekar sari dan Pelantai. (2) Demonstrasi di Selat Panjang, dengan menyertakan ratusan warga simpatisan. (3) Demonstrasi di gedung DPR RI dan di Gedung Kementerian Kehutanan RI di Jakarta yang melibatkan sekitar 70 – 100 peserta. (4) Pertentangan pendapat dalam forum-farum resmi, seperti seminar dan lokakarya serta pertemuan lainnya yang

bermaksud menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung cukup lama. (5) Penghadangan tim kerja PT. RAPP, penyerangan secara fisik dan Pengrusakan fasilitas/alat berat PT. RAPP, di Desa Tanjung Padang, Desa Lukit, Teluk Belitung dan Tanjung Kulim. (6) Konflik horizontal, yang melibatkan pihak STR dengan anti gerakan STR, seperti penyerangan terhadap tokoh tertentu dan pengucilan warga yang teridentifikasi lebih pro kepada PT. RAPP dan anti STR dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam aktivitas sosial dan aktivitas publik lainnya. Berbagai bentuk konflik tersebut di atas tidak saja melahirkan keresahan sosial di kalangan masyarakat luas, bahkan minggatnya beberapa keluarga dari kampung basis STR, terutama di Desa Tanjung Padang, Desa Lukit, Desa Teluk Belitung, Desa Mengkirau dan Desa Bagan Melibur. Selain itu konflik tersebut telah pula menelan korban jiwa di Desa Tanjung Padang dan Desa Lukit.

Sejak perusahaan berdiri sebetulnya telah muncul beberapa permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat. Permasalahan yang timbul antara lain berupa klaim masyarakat berbagai desa bahwa tanah mereka telah “diserobot” oleh perusahaan. Di sisi lain perusahaan pun merasa bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari Lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)-nya yang diaku oleh masyarakat.

Terkait berbagai konflik di atas, maka penting untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi. Salah satu tahapan untuk menuju kesana adalah dengan melakukan analisis stakeholders pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di atas. Dengan teridentifikasinya stakeholders dan tentu kepentingan masing-masing stakeholders maka dapat dirumuskan alternatif solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis stakeholders yang terlibat dalam konflik di Pulau Padang.

## METODE

Lokasi penelitian adalah di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti yang notabene merupakan desa sekitar hutan konsesi PT. RAPP. Adapun nama-nama desa tersebut adalah: Desa Tanjung Padang, Desa Lukit (Dusun Tanjung Gambar dan Dusun Sungai Kuat), Desa Belitung, Desa Mengkirau dan Desa Bagan Melibur. Data yang digunakan dalam makalah ini merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel internet dan hasil penelitian terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Padang terdiri dari 14 desa yang semuanya berada di pinggiran pulau dan berbatasan langsung dengan laut. Penduduk Pulau Padang terdiri dari Suku Melayu Asli (Suku Akit), Melayu Modern, Tionghoa dan Jawa. Sisanya adalah sedikit dari Minang dan Batak. Etnis Tionghoa bermukim di sekitaran pantai untuk berdagang, Suku Jawa masuk ke darat untuk bertani dan suku Melayu berada di tengah-tengah seolah-olah mencari posisi yang aman-aman saja, tidak kaya dan tidak miskin, seadanya. Perbedaan Jawa dan Melayu tidak jelas, sudah berbaur dan tak terpisah. Hanya saja kebun masyarakat di Lukit sedikit lebih rapi dan banyak tanaman karet dan sawit baru

Setiap desa memiliki pelabuhan yang bisa disinggahi perahu lokal atau kapal speed boat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang ke berbagai tujuan. Teluk Belitung merupakan pelabuhan terbesar karena merupakan ibukota Kecamatan Merbau. Disamping itu terdapat pelabuhan Tanjung Asam, pelabuhan kecil di Desa Ketapai dan lainnya di Pulau Padang. Hampir seluruh pantai Pulau Padang (PP) ditumbuhi bakau, sedikit dihiasi pelabuhan kecil-kecil, rumah penduduk dan rumah walet dan industri sagu.

Untuk mencapai lokasi Pulau Padang dapat dilalui dari Batam melalui Selat Panjang atau dari Bengkalis serta dari Buton di wilayah Pelalawan dengan angkutan laut. Sarana angkutan laut yang biasa beroperasi antara lain speedboat besar kapasitas penumpang 250 orang, speed boat sedang dengan kapasitas 35 orang dan speed boat kayu juga kapasitas 35 orang. Sedangkan barang hasil bumi dari Pulau Padang diangkut dengan kapal kayu (pompong). Ongkos speed boat Teluk Belitung-Selat Panjang sebesar Rp. 45 ribu/penumpang, sedangkan dengan speed kayu lebih murah dan lebih lama.

Kondisi sarana dan prasarana jalan semuanya merupakan aspal beton dan menghubungkan 10 desa. Saat ini sedang berlangsung pembangunan jalan terbuat dari semen sepanjang 5 km yang menghubungkan Desa Mangkopot dengan Desa Sungai Akar serta menghubungkan desa-desa lainnya. Beberapa jalan kecil atau gang di desa-desa sudah banyak yang dibangun. Kondisi jalan di beberapa tempat sudah mengelupas dan tulang besi sebesar lidi sudah muncul. Tidak ada mobil angkutan umum, kecuali kendaraan milik pemda dan PT. Kondur. Sarana angkutan darat yang tersedia hanya ojek. Sarana transportasi dari desa ke desa umumnya menggunakan sepeda motor, atau transportasi ke wilayah lain yang belum memiliki akses jalan ditempuh dengan menggunakan perahu.

Jaringan Listrik PLTD dari PLN hampir mencapai semua desa walaupun masyarakat baru dapat menikmati listrik pada malam hari. Namun demikian pembayaran listrik tampaknya lebih mahal dibanding di kota. Air bersih yang digunakan masyarakat adalah air tanah/sumur. Namun karena rasanya payau atau asin serta berwarna coklat, maka masyarakat juga memanfaatkan air hujan yang ditampung di bak gentong dari tanah liat atau drum plastik besar setiap rumah. Untuk masyarakat di daerah-

daerah di luar Kota Teluk Belitung memanfaatkan air di sungai-sungai kecil yang mengalir untuk MCK. Untuk memasak, masyarakat sudah umum menggunakan kompor gas. Untuk hiburan hampir tidak ada radio karena aliran listrik tidak ada pada siang hari, adapun hiburan pada malam hari dengan menonton televisi.

Hasil bumi dari Pulau Padang utamanya adalah hasil perkebunan seperti karet, sagu dan sawit serta penangkapan ikan. Peternakan yang berkembang jumlah yang relatif kecil dengan jenis ternak kambing dan sapi. Saat ini secara umum di Pulau Padang harga bahan pokok seperti beras sekitar 9 - 10 ribu/kg, ayam pedaging 28 ribu, ayam kampung 35, daging 70 ribu dan hanya ada di pasar kecamatan. Harga karet 8 ribu, sawit 550, sagu 30 - 45 ribu per tual (40 inc) dan mencapai 500-700 ribu per batang umur 12 tahun. Ikan variasi, teri basah 5 ribu dan teri kering 35-40 ribu di nelayan dan 55 ribu di pasar kecamatan.

Luas kebun masyarakat variasi dari berupa lahan pekarangan hingga lahan garapan seluas 2 atau 3 ha. Hanya sebagian kecil yang mempunyai lahan luas kepemilikan luasan kebun karet, kebun sagu, kebun sawit hanya sedikit. terdapat juga tanaman sagu di lokasi kebun karet. Hampir semuanya tanaman di kebun tidak dibudidayakan secara intensif, dipelihara seadanya dan dipanen seoptimalnya. Kondisi ekonomi masyarakat relatif pada tataran menengah. Hampir setiap rumah memiliki Motor karena parasarana ini merupakan mobilitas utama menduduk jika harus bepergian. Beras diperoleh harus dengan membeli karena tidak ada sawah maupun ladang. Jika masyarakat ingin mendapat uang, cukup dengan menyadap karet atau menebang sagu yang keduanya tak pernah dipupuk, dipelihara seadanya saja. Konsumsi masyarakat sehari-hari terdiri ikan segar digulai atau goreng, masyarakat jarang mengkonsumsi sayur, sesekali sayuran kol, jarang terdapat buah,

kecuali durian dan manggis yang akan melimpah saat musim.

### **Pihak-Pihak terlibat dalam konflik di Pulau Padang**

Konflik di Pulau Padang melibatkan unsur-unsur perusahaan (RAPP), LSM, seperti STR dan Pemerintah, baik pemerintah lokal hingga nasional. Berikut ini penjelasan dari masing-masing para pihak yang terlibat dalam konflik di Pulau Padang

#### **1. PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT.RAPP)**

PT. Riau Andalan Pulp And Paper (PT. RAPP) yang 98,5 persen sahamnya dimiliki oleh Grup *APRIL (Asia Pacific Resources Holding Limited)* adalah salah satu perusahaan penghasil produk bubur kertas (*pulp*) dan produk kertas (*paper*) terkemuka di dunia. Bahan baku utama PT. RAPP adalah kayu alam campuran (*Mixed Hard Wood*) dan kayu tanaman industri (akasia) yang bersumber dari area ijin konsesi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 330.000 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten di Propinsi Riau. Selain itu PT. RAPP juga memperoleh pasokan kayu yang bersumber dari area hutan milik masyarakat seluas 20.000 hektar dalam kemitraan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan bersumber dari area konsesi HPH perusahaan lain seluas 250.000 hektar dalam bentuk *joint ventures*. Total area hutan yang dijadikan sebagai sumber bahan baku kayu PT. RAPP adalah seluas 600.000 hektar (*Sustainable Report of APRIL, 2004*). PT RAPP mulai beroperasi tahun 1995. Pabriknya direncanakan oleh perusahaan konsultan Finlandia Jaakko Pöyry, dimana mesin-mesin umumnya didatangkan dari Eropa, khususnya dari perusahaan-perusahaan manufaktur Eropa Utara. Sejumlah agen kredit export telah menjamin sejumlah pinjaman bagi APRIL, termasuk Finnish Guarantee Board dan Swedish Exportkreditnamnden. Salah satu pembeli tunggalnya adalah perusahaan

Finlandia, UPM yang pabrik kertasnya di Changshu, China secara tertutup menggunakan pulp dari RAPP. RAPP menjual pulp dan produk kertas bermutunya (dengan cap PaperOne) ke seluruh dunia, sementara pasar utamanya adalah Asia Timur dan Asia Tenggara.

Perusahaan ini memulai operasinya sebelum memiliki perkebunan untuk mensuplai bahan baku industrinya, dan karenanya mereka pada mulanya mengandalkan sepenuhnya dari hutan-hutan alam. Berdasarkan angka-angka perusahaan sendiri, setelah sepuluh tahun, dan masih terus seperti ini: RAPP hanya memperoleh 20-30% bahan baku dari perkebunan monokultur akasiannya. Sisanya mereka ambil dari hutan-hutan alam yang terdapat di dalam konsesi-konsesi mereka (280.000 ha) dan juga dari luar area konsesi. Hal itu akan tetap berlangsung sampai tahun-tahun mendatang, kendati makin langkanya hutan-hutan alam di Riau akan menjadi sumber masalah. Beberapa area hutan dataran rendah telah dibuka oleh APRIL, seperti wilayah penyangga (buffer zone) Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sekeliling Taman Nasional Teso Nilo dan wilayah pesisir rawa-rawa gambut di Pelalawan. Beberapa binatang langka mulai berkurang, seperti harimau dan gajah Sumatera, karena ekspansi berbagai usaha. Keberadaan RAPP selain merusak hutan, juga terlibat dalam konflik lahan di sekitar Riau, yang sebagian diantaranya mengakibatkan tindak kekerasan yang melakukan protes ketika tanah-tanah mereka digusur. Merganti Manaloe melaporkan bahwa masalah sengketa lahan di desa Delik, Riau pernah meletus pada tahun 1997, ketika polisi melakukan penembakan dalam suatu demonstrasi yang berlangsung damai, menyebabkan kematian seorang petani lokal.

Dalam kaitan dengan Pulau Padang, secara kelembagaan perusahaan RAPP mendapat izin HTI dari pemerintah. Namun sekelompok masyarakat bersama

LSM Serikat Tani Riau menolak keberadaan RAPP dan menuntut untuk keluar dari Pulau Padang. Pihak RAPP yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat adalah yang berada di lapangan, mulai dari Staff dan karyawan di lokasi Pulkau Padang sampai ke perwakilan di Pelalawan.

## 2. Masyarakat

Desa-desa di Pulau Padang terdiri dari 14 desa. Sebagian masyarakatnya menolak keberadaan RAPP di pulau tersebut. Masyarakat yang menolak tersebut terutama yang bermukim di 4 desa, yaitu Desa Bagan Melibur, Mangkirau, Pelantai, dan Desa Lukit. Namun demikian ada juga sebagian kecil masyarakat yang netral bahkan mendukung RAPP. Sedangkan penduduk desa-desa lain umumnya netral bahkan mendukung dan hanya sebagian kecil yang ikut menolak RAPP.

## 3. Lembaga Swadaya Masyarakat serikat Tani Riau (STR)

Di desa-desa yang menolak keberadaan RAPP terdapat organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan lembaganya LSM Serikat Tani Riau. LSM ini dipimpin oleh Muhammad Ridwan dan Sutarno. Masing-masing merupakan penduduk Kelurahan Teluk Belitung dan Lukit. Lembaga ini rajin menggalang masyarakat local dan juga nasional untuk menolak operasional RAPP. Mereka melakukan demo di lokasi perusahaan di Pulau Padang, melakukan demonstrasi ke kabupaten, provinsi bahkan yang terakhir ke Jakarta. Secara 5ias5tural STR berada dibawah sebuah LSM. STR ini dalam perjuangannya didukung oleh LSM Walhi maupun Jakalahari di Pekanbaru.

## 4. Pemerintah

Pemerintah, memiliki kepentingan terhadap pulau padang, karena mereka memiliki kewajiban mengorganisir masyarakat dan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang berada di wilayah mereka.

### • Pemerintah Desa

Desa di Pulau Padang dapat dibagi dua, yaitu desa-desa yang menolak dan desa-desa yang netral atau setuju. Dengan

demikian secara tidak langsung kondisi ini terkait dengan pemerintah desanya. Kepala Desa di desa yang menolak keberadaan RAPP merasa serba salah karena disatu sisi merupakan wakil pemerintah kabupaten dan di sisi lain menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Ketika ditanya, maka mereka menyatakan dalam posisi yang netral. Mereka menyampaikan kebijakan pemerintah ke masyarakat dan menyuarakan pendapat masyarakat ketika rapat maupun bertemu di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

- **Pemerintah Kecamatan Merbau**

Di tingkat kecamatan, yang paling menonjol dalam kaitan dengan kasus HTI ini adalah Camat. Masyarakat penolak HTI merasa Camat kurang menyuarakan aspirasi mereka, sehingga bila ada kegiatan yang berkaitan dengan RAPP, maka sering digagalkan oleh masyarakat penolak.

- **Pemerintah Kabupaten Meranti (Bupati, Kadishut, DPRD)**

Bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten menjadi sasaran utama STR dan masyarakat penolak untuk mencabut izin HTI. Hal ini disebabkan Bupati merupakan pihak yang memberi izin rekomendasi untuk ditindaklanjuti di Kementerian Kehutanan. Disamping Bupati juga yang turut diharapkan masyarakat membantu adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Meranti serta DPRD. Bupati tidak bias mencabut izin HTI karena izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI.

- **Pemerintah Provinsi Riau (Gubernur, Kadishut, DPRD)**

Di tingkat provinsi, sasaran demonstrasi masyarakat dan LSM adalah Gubernur Riau. Disamping itu yang juga diharapkan pihak pendemo memberi dukungan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan DPRD Provinsi Riau

- **Pemerintah Pusat**

Disamping Bupati, maka Menteri Kehutanan RI menjadi harapan utama masyarakat pendemo untuk mencabut izin HTI di Pulau Padang. Dalam rangkaian mendesak Menteri Kehutanan dan meminta dukungan, maka mereka

melakukan kegiatan unjuk rasa dengan berkemah di depan Gedung DPR. Untuk lebih menarik perhatian, maka mereka melakukan jahit mulut selama sehari-hari. Lembaga DPR yang memberi perhatian kepada kelompok pendemo antara lain Wan Abubakar sebagai anggota DPR yang berasal dari Riau. Para wakil rakyat tersebut melakukan kunjungan ke Pulau Padang dan memberi masukan kepada Bupati maupun Kemenhut agar diselesaikan dengan jernih.

- **TNI Polri Kecamatan Merbau**

Memiliki kepentingan terhadap Pulau Padang karena mereka memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

## 5. Pelaku *Illegal Logging*

Dari jalan yang menghubungkan desa ke desa lain di Pulau Padang, terutama di Desa Pelantai dan Meranti Bunting ada beberapa (sekitar 5 lokasi) jalan tikus (selebar 3 m) sebagai jalan untuk membawa kayu dari hutan dan beberapa lokasi sudah tinggal bekasnya saja. Masyarakat mengambil kayu untuk pribadi membangun rumah, dijual kepada tetangga untuk membangun rumah, bahan furniture atau ke laut untuk dikirim ke daerah lain. Jarak mengambil kayu dari pinggir jalan ke hutan sampai 5-7 km. Mereka menebang memakai mesin sinso, lalu dibawa pakai sepeda atau sepeda motor. Di jalan kecamatan yang sudah diaspal beton barulah dilangsir dengan gerobak. Hasil kayu tersebut sudah berbentuk papan, balok dan kaso. Jenis kayunya adalah meranti dan lain-lain.



**Gambar 1. Foto Sawmill Liar di jantung kawasan gambut Pulau Padang (Sumber: Riau Pos, 5 februari 2012)**

## 6. Perusahaan Lain

Saat ini perusahaan yang beroperasi di Pulau Padang hanyalah pertambangan minyak dan gas EMP Malacca Strait atau lebih dikenal dengan sebutan PT. Kondur Petroleum. Perusahaan ini memiliki kepentingan terhadap Pulau Padang untuk mengambil cadangan minyak yang ada di pulau ini dan pulau lainnya. Pusat kegiatan perusahaan ini ada di Kurau, Pulau Padang. Perusahaan ini sudah lama berkegiatan di Pulau Padang, lokasi kegiatan mereka adalah di beberapa desa, terutama Desa Lukit, Teluk Belitung, Bagan Melibur, Mekarsari dan Pelantai. Sumur bor mereka menyebar sejak dari perkampungan penduduk sampai ke wilayah kebun warga. Lahan-lahan warga yang terkena kawasan pengeboran dilakukan ganti rugi oleh Kondur dengan harga yang menarik, baik bagi lahannya maupun tanaman di atasnya. Perusahaan ini telah memberi porsi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Padang melalui penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur jalan, proses ganti rugi, dana bagi hasil tambang (melalui pusat ke kabupaten), serta dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sikap Kondur terhadap RAPP sampai saat ini tampaknya netral saja. Belum diketahui apakah Kondur menolak atau keberatan terhadap keberadaan RAPP. Disamping perusahaan Kondur tidak ada lagi perusahaan besar di Pulau Padang. Kalau pun ada, hanya perusahaan pengolahan sagu skala kecil.

### **Analisis Stakeholders: tokoh-tokoh kunci**

Stakeholders yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah semua yang mempengaruhi, dan atau dipengaruhi oleh, kebijakan, keputusan dan tindakan terkait konflik di Pulau Padang. Hal itu dapat bersifat individual,

masyarakat, kelompok sosial atau institusi dalam berbagai ukuran, kesatuan atau tingkat dalam masyarakat (Grimble & Chan, 2005). Analisis stakeholders dalam tulisan ini difokuskan kepada analisis tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam konflik. Hubungan antar aktor terjalin karena adanya hubungan kerja, hubungan fungsi sosial, hubungan saling membutuhkan, hubungan peranan sosial aktor dan posisi sosial antar aktor. Berdasarkan hasil penelitian CARE IPB (2012) diketahui ada 47 tokoh yang cukup intens menaruh perhatian atau terkait dalam peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dinamika kasus Pulau Padang, baik yang pro RAPP maupun kontra RAPP. Selanjutnya ke-47 tokoh tersebut dianalisis dengan menggunakan Metode Power-Interest Grid (IFC, 2007)

Kekuatan (power) mengacu kepada seberapa besar kemampuan dana, jaringan, status sosial/jabatan dan personality masing-masing stakeholders dalam mempengaruhi arah dan dinamika perkembangan konflik sosial di Pulau Padang. Kekuatan pengaruh tertinggi terjadi apabila seseorang dengan unsur-unsur kekuasaan yang dimilikinya menjangkau dari tingkat desa hingga ke tingkat berskala nasional atau lintas provinsi. Interest mengacu kepada kepentingan yang diusung oleh pelaku dalam mempengaruhi dinamika konflik sosial, seperti kepentingan ideologi, penegakan hukum, kepentingan adat, kepentingan politik dan yang terendah kepentingan materi. Hasil analisis stakeholders disajikan pada Tabel 1.

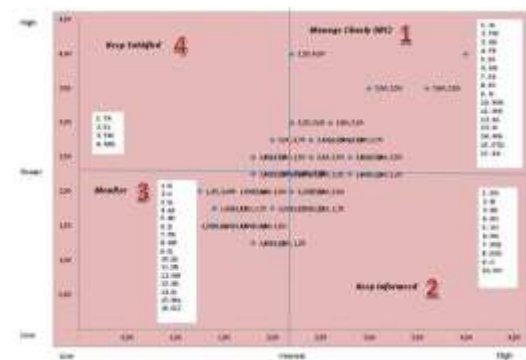


**Tabel 1. Hasil analisis stakeholders di Pulau**

Padang			
1	IA	2,20	4,00
2	TH	2,60	2,75
3	AM	3,00	3,50
4	TB	1,80	1,50
5	TA	2,00	2,75
6	SM	2,40	1,75
7	SS	2,20	3,00
8	AN	2,20	3,00
9	SA	2,40	2,75
10	SS	2,60	3,00
11	SI	1,80	1,25
12	IS	3,00	2,50
13	MN	2,80	2,50
14	MR	2,80	2,75
15	JI	1,60	1,50
16	SL	1,60	1,75
17	AA	2,00	1,75
18	II	1,40	1,50
19	ZI	1,40	1,75
20	IT	1,20	1,50
21	AS	2,40	2,50
22	SL	1,80	2,50
23	TM	1,80	2,50
24	AM	1,80	2,25
25	BI	2,40	2,00
26	SL	1,60	1,75
27	EG	2,20	2,25
28	MI	2,20	1,75
29	YH	2,40	2,00
30	PN	2,80	2,25
31	KI	2,40	2,50
32	MA	2,40	2,50
33	STO	3,60	3,50
34	MD	3,00	2,25
35	SSO	2,40	2,25
36	ZA	2,00	2,25
37	SN	1,60	2,00
38	KM	1,25	2,00
39	MJ	1,80	2,25
40	SL2	1,80	2,00
41	ZL	2,00	1,25
42	AN	2,40	2,75
43	MA	1,40	1,75
44	AR	2,40	2,50
45	II	2,40	2,00
46	SH	2,20	2,00
47	MO	2,00	2,50

Sumber: CARE IPB, 2012

Berdasarkan metode tersebut stakeholders dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu stakeholders kategori **manage closely (MC)**, **keep statisfied (KS)**, **keep informed (KI)** dan **monitor (M)**. Stakeholder kategori MC merupakan stakeholders yang perlu secara intensif dikelola oleh perusahaan mengingat stakeholders tersebut memiliki power dan interest yang tinggi. Stakeholder kategori KS merupakan stakeholders yang memiliki power tinggi namun interest relatif rendah, dan kebalikan dari KS adalah KI. Adapun stakeholders kategori M merupakan stakeholders yang relatif tidak memiliki power dan interest. Pengkategorian tersebut berdasarkan penilaian masing-masing stakeholders berdasarkan aspek kekuatan pengaruh (power) dan interest.



**Gambar 2. Analisis stakeholders model power-interest grid (modifikasi)**

Hasil analisis terhadap kategori-kategori kekuatan pengaruh dan kepentingan tersebut di atas diolah dengan **Metode Power-Interest Grid (IFC, 2007)** dan menghasilkan pemilihan stakeholders menurut kuadran manage closely (MC), keep informed (KI), monitor (M) dan Keep Satisfied (KS). Berdasarkan kriteria di atas, maka diantara 47 stakeholder yang



teridentifikasi, terdapat terdapat 36,17 persen termasuk kategori MC, 8,51 persen termasuk kategori KS, 21,28 persen termasuk kategori KI dan 34,04 persen kategori M. Berdasarkan data tersebut maka diantara 47 stakeholder terdapat 8,51 persen (golongan KS) yang secara murni dapat digunakan pengaruhnya untuk membantu menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan pribadinya rendah. Golongan ini diharapkan dapat menetralkan pertarungan kekuasaan dan kepentingan golongan MC.

### Strategi Pengelolaan Stakeholders

Keberhasilan dalam pengelolaan tergantung pelibatan stakeholders untuk ikut berperan dan bekerja aktif mengarah tujuan yang akan dicapai (Muliawan et al, 2016). Stakeholders diharapkan membangun pandangan strategis terhadap orang maupun lembaga yang terlibat dengan melihat hubungan maupun perbedaan antar stakeholders dan isu utama yang perhatian masing-masing. Berdasarkan analisis stakeholders, terdapat empat kategori stakeholders, pertama tokoh yang berada pada kuadran 1, yang berarti tokoh-tokoh tersebut memiliki power dan interest yang tinggi. Strategi pengelolaan stakeholders pada tokoh-tokoh kuadran ini adalah perlu melakukan pengelolaan stakeholders secara intensif (*manage closely*). Artinya perusahaan perlu melakukan strategi proaktif. Perusahaan melakukan komunikasi secara proaktif kepada stakeholder dengan mengedepankan pengakuan dan penghormatan terhadap stakeholder. Perusahaan harus mengkomunikasikan harapannya kepada stakeholder, sekaligus menerima aspirasi dan kepentingan stakeholder. Pada stakeholders yang terkategori kuadran 2 yang berarti interest tinggi dan power rendah, perusahaan cukup melakukan strategi *keep informed*. Perusahaan membangun komunikasi dengan stakeholder dengan secara periodik dan terus menerus (reguler). Hubungan komunikasi yang dibangun oleh perusahaan dengan stakeholder bukan berdasarkan kepada kepentingan

perusahaan semata. Pada stakeholders yang terkategori kuadran 3 yang berarti power tinggi dan interest rendah, maka perusahaan perlu melakukan strategi antisipatif atau istilah lain *keep satisfied*. Perusahaan membangun komunikasi dengan stakeholder sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak yang tidak diharapkan oleh perusahaan. Komunikasi yang dibangun oleh perusahaan dengan stakeholder haruslah mampu untuk mengantisipasi dampak negative atas kepentingan stakeholder kepada perusahaan. Pada stakeholders yang terkategori kuadran 4 yang berarti power dan interest rendah, perusahaan cukup melakukan strategi defensif atau cukup memonitor. Perusahaan membangun komunikasi dengan menerima aspirasi dan kepentingan stakeholder dengan tanpa melakukan penekanan kepada stakeholder. Dalam kondisi tertentu, komunikasi defensive diperlukan oleh perusahaan menghindari terjadinya masalah yang berkelanjutan bagi pihak perusahaan.

## SIMPULAN

Pihak-pihak yang terkait konflik di Pulau Padang melibatkan unsur-unsur perusahaan (RAPP), LSM, seperti STR dan Pemerintah, baik pemerintah lokal hingga nasional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada 47 tokoh yang cukup intens menaruh perhatian atau terkait dalam peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dinamika kasus Pulau Padang. Selanjutnya ke-47 tokoh tersebut dianalisis dengan menggunakan Metode Power-Interest Grid (IFC, 2007). Hasil analisis terhadap kategori-kategori kekuatan pengaruh dan kepentingan tersebut di atas diolah dengan Metode Power-Interest Grid (IFC, 2007). Berdasarkan kriteria di atas, maka diantara 47 stakeholder yang teridentifikasi, terdapat terdapat 36,17 persen termasuk kategori *manage closely* (MC), 8,51 persen termasuk kategori *keep satisfied* (KS), 21,28 persen termasuk kategori *keep informed* (KI) dan 34,04

persen kategori *monitor* (M). Berdasarkan data tersebut maka diantara 47 stakeholder terdapat 8,51 persen (golongan KS) yang secara murni dapat digunakan pengaruhnya untuk membantu menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan pribadinya rendah. Golongan ini diharapkan dapat menetralkan pertarungan kekuasaan dan kepentingan golongan MC.

Kepulauan Meranti Provinsi Riau.( SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)

Muliawan, Irwan & Fahrudin, Achmad & Fauzi, Akhmad & Boer, Menofatria. 2016. Analisis Stakeholders Pada Perikanan Tangkap Kerapu, Preliminary Study Menuju Implementasi Ecosystem Approach For Fisheries Management Di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Vol 9.

## DAFTAR PUSTAKA

[CARE IPB]. Center for Alternative dispute Resolution and Empowerment Pusat Kajian Resolusi Konflik Institut Pertanian Bogor, 2012. Resolusi Konflik Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Pulau Padang. Bogor (ID): CARE IPB.

Grimble, R. and M. K. Chan. 1995. Stakeholder analysis for natural resource management in developing countries: Some practical guidelines for making management more participatory and effective. Nat. Resources Forum 19:113–124.

International Finance Corporation (IFC). 2007. Stakeholder Engagment. [www.ifc.org/enviro](http://www.ifc.org/enviro). First printing, Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C.

Riau Pos. 2012. Melihat Pulau Padang dari Atas Udara: Pulau Eksotik, Terancam pembalakan liar

STR. 2011. Tolak HTI PT. RAPP di Pulau Padang Meranti: Kronologis Penolakan Masyarakat Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap HTI PT. RAPP Blok Pulau Padang (SK No. 327/menhut-ii/2009 tanggal 12 juni 2009) dan Gambaran Singkat Pulau Padang. Kabupaten Meranti.

Tim Mediasi, Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten

